

PANSUS DPRD KOTA YOGYA FOKUSKAN PENCERMATAN

Penyesuaian Retribusi Sampah Jangan Beban Warga

YOGYA (KR) - Panitia khusus (pansus) DPRD Kota Yogya fokus melakukan pencermatan atas draf Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya menyangkut penyesuaian tarif retribusi sampah agar jangan sampai membebani warga.

Wakil Ketua Pansus Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, mengungkapkan besarnya tarif pemungutan retribusi sampah non komersil jenis layanan rumah tangga termasuk yang disesuaikan.

Dua faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan penentuan tarif retribusi berdasarkan bobot atau per kilogram, dan keharusan warga membuang sampah melalui transporter atau penggerobak. Skema penghitungan per kilogram dalam penetapan retribusi sampah berdampak pada kenaikan tarif yang harus ditanggung warga.

"Bila diterapkan retribusi per kilogram harap dikaji lagi agar tidak memberatkan masyarakat," terangnya, Kamis (6/2).

Pemungutan retribusi sampah terutama non komersil jenis layanan rumah tangga sebelumnya dapat dibuang di depo. Retribusi pembayaran per bulan dengan kategori besar Rp 15.000, kategori sedang Rp 10.000, kategori kecil Rp

5.000, serta kategori mikro Rp 3.000. Melalui perubahan tarif dalam raperda tersebut maka dikenakan retribusi sebesar Rp 500 per kilogram untuk sampah tercampur dan Rp 100 per kilogram untuk sampah terpilah. "Sebagai utusan fraksi kami maka meminta agar eksekutif melakukan perhitungan ulang terkait rencana tarif tersebut agar tidak memberatkan warga," imbuh politisi PKS itu.

Pihaknya juga memberikan catatan sosialisasi terkait tata cara pemilahan sampah yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara masif. Apalagi saat ini beredar informasi bahwa mulai 1 Maret 2025 warga tidak

dibolehkan lagi membuang sampah di depo. Depo sampah hanya akan menerima sampah dari transporter. Bahkan setiap kelurahan wajib menjembatani warga yang belum berlangganan penggerobak. Sehingga masyarakat akan terbebani dengan dua pungutan yakni retribusi sampah sesuai dengan berat yang dititipkan kepada penggerobak serta jasa penggerobak yang sampai saat ini belum ada standarisasi biayanya.

Nurcahyo kembali menegaskan dalam pandangan umum Faksi PKS merekomendasikan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang. Hal itu mengingat waktu yang cukup singkat serta kurangnya sosialisasi serta ujicoba secara masif di masyarakat. "Jika belum ada langkah yang jelas dalam penanganan dan masih menimbulkan kegaduhan di masyarakat, maka Fraksi PKS

merekomendasikan untuk tidak memungut retribusi sampah rumah tangga non komersial berdasarkan berat sampah sampai permasalahan sampah di Kota Yogya dapat teratasi. Sehingga masih tetap berdasarkan tarif lama," urainya.

Sementara Ketua Pansus Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, mengatakan pihaknya masih dalam tahap pencermatan materi. Pansus tengah melakukan ekspos bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, kesepakatan jasa pungutan sampah selama ini disepakati oleh masyarakat dan tidak ditentukan oleh pe-

merintah. "Maka kami masih menunggu dari Pemkot agar dilakukan harmonisasi terkait mekanisme tarif berbasis wilayah dan rencana dari pemerintah," ujarnya.

Menanggapi hal itu Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengaku draft raperda tersebut masih akan ada proses pembahasan men-

dalam antara eksekutif dan pansus. Pihaknya juga memastikan payung hukum yang diusulkannya menjunjung tinggi nilai keadilan serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Pemerintah tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Saya kira tidak akan mungkin lah merugikan masyarakat," tegasnya. **(Dhi)-f**

Subardi: Kementerian BUMN dan Danantara Akan Selaras

YOGYA (KR) - Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru resmi melahirkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Badan super holding itu memang belum beroperasi karena menunggu aturan turunannya. Meski demikian, Anggota Panja RUU BUMN Subardi menegaskan tidak ada benturan kewenangan antara Kementerian BUMN dengan Danantara. "Tidak ada benturan kewenangan. Masing-masing kewenangan diatur tegas dalam undang-undang," kata Subardi, Kamis (6/2).

Menurut legislator dari Fraksi NasDem itu, pembentukan Danantara akan mengurangi konflik kepentingan melalui pemisahan yang tegas antara fungsi regulasi dan operasionalisasi BUMN. Sebelumnya perusahaan BUMN secara tanggung jawab keuangan negara berada di Kementerian Keuangan, sedangkan kuasa pengelolaan ber-



KR - Istimewa

Anggota Panja RUU BUMN Subardi.

ada di Kementerian BUMN. Kini, Kementerian BUMN dan BPI Danantara ditetapkan sebagai pemilik seluruh perusahaan BUMN. Secara kewenangan, Kementerian BUMN akan menjadi regulator dan BPI Danantara menjadi eksekutor.

"Justru adanya Danantara akan membuat BUMN lebih lincah. Menteri BUMN sebagai regulator bertugas menetapkan kebijakan, pengaturan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengelolaan BUMN. Selanjutnya Danantara

yang akan mengeksekusi desain restrukturisasi BUMN, seperti pembentukan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BUMN," ucap Subardi.

Pembentukan BPI Danantara merupakan strategi jangka panjang. Subardi juga meyakini Danantara memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Berdasarkan Pasal 3E dan 3AA UU BUMN yang baru, Danantara berperan sebagai Holding Opera-

sional dan Bisnis BUMN. Danantara juga dapat bekerja sama dengan investor luar negeri sehingga akan menambah aset BUMN untuk pengembangan bisnis atau pembiayaan.

Selain aspek holdingisasi, UU BUMN mengatur perubahan mekanisme setoran dividen BUMN. Danantara akan mengelola aset-aset BUMN untuk diinvestasikan menjadi nilai tambah. Dengan meningkatnya investasi, modalan BUMN akan lebih kuat. Model operasional ini mirip dengan Temasek Holdings di Singapura. Di Temasek, aset perusahaan negara dikelola oleh badan khusus untuk memperoleh laba.

"Bila sebelumnya dividen langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan dan masuk ke kas negara, kini dividen tersebut akan dialihkan ke Danantara untuk dikelola lagi menjadi nilai tambah," tutup Anggota Komisi VI itu. **(*)-f**

PENGUMUMAN						
Nomor : 3/Peng-33.04.HP.01/II/2025						
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian Hak baru atas Tanah Asal konversi Hak Barat, dan untuk mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan untuk kegiatan permohonan hak atas tanah, dengan ini diumumkan sebagai berikut :						
No	Nomor Hak	Atas Nama	Letak Tanah	Luas Tanah	Hak berakhir Tanggal	Diajukan permohonan Hak Oleh
1	Tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 59	1. Tio Keng Liang 2. Tio Keng Hi 3. Tio Keng Hong 4. Tio Keng Tong	Batur	622 m ²	23-9-1980	Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia
2	tanah Negara bekas Eigendom Nomor 3892	Oey Swie Kong	Batur	250 m ²	-	Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta

Barang siapa merasa keberatan atas permohonan tanah tersebut diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman ini untuk mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang sah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Jalan Letjen Supratno No. 68 Banjarnegara.

Banjarnegara, 05 Februari 2025
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

NURDIN KAREPESINA, S.SIT
NIP. 196706161991031004

BRI PEDULI SALURKAN BANTUAN 'CEGAH STUNTING ITU PENTING' Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia

JAKARTA (KR) - Masalah gizi pada balita masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia. Stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kualitas hidup individu. Dampak tersebut mencakup keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta risiko gangguan metabolik di masa dewasa.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan RI, prevalensi stunting di Indonesia tercatat mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Penurunan sebesar 2,8% ini sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sekitar 2,7% per tahun, dengan tujuan mencapai angka 14% pada tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai intervensi spesifik yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-23 bulan. Intervensi ini meliputi skrining anemia dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian TTD pada ibu hamil, serta pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani bagi anak usia di bawah dua tahun.

BRI turut mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan "Cegah Stunting itu Penting" di berbagai wilayah di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI Catur



KR - Istimewa

Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan "Cegah Stunting itu Penting" di berbagai wilayah di Indonesia BRI peduli cegah stunting.

Budi Harto mengungkapkan bahwa program ini sekaligus dilakukan dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

BRI menyelenggarakan program ini di 25 Posyandu/Puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Padang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Makassar, Banjarmasin dan Manado. Bantuan yang diberikan berupa pemberian paket *Antropometri Kit* di Puskesmas dimana setiap satu paket *Antropometri Kit* terdiri dari Timbangan Digital, Timbangan Bayi, Infatometer, Stadiometer dan Tensi Digital.

Catur menambahkan bahwa BRI Peduli 'Cegah Stunting Itu Penting' merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainability and Development Goal's* (SDG's) No.2

Tanpa Kelaparan.

BRI tidak hanya mampu membantu mendorong program pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan hebat untuk masa depan yang lebih baik.

"Inisiatif ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 dan merupakan upaya nyata BRI mendukung penurunan angka Stunting Indonesia sekaligus mendorong generasi muda Indonesia yang berkualitas," ungkap Catur.

Pemberian bantuan *Antropometri Kit* di Puskesmas juga merupakan upaya nyata BRI dalam mendorong pelayanan kesehatan dasar yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu BRI juga menyalurkan 6000 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak.

Manfaat dari program BRI Peduli 'Cegah Stunting Itu Penting' salah

satunya dirasakan oleh warga di Posyandu ILP Anyelir 07, Desa Gunungsari, Kota Batu, Malang. BRI Peduli berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan kegiatan "Cegah Stunting Itu Penting" di Posyandu tersebut.

"Program ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam tumbuh kembangnya khususnya Balita" ungkap Dr. Kartini Kristalina selaku Kepala Puskesmas Bumiaji.

Sebagai informasi, pada 2024 lalu, BRI Peduli berhasil menyalurkan program 'Cegah Stunting Itu Penting' di 24 Puskesmas/Posyandu yang tersebar di Denpasar, Manado, Jakarta 3, Makassar dan Jayapura. BRI Peduli telah menyalurkan bantuan 70 paket Antropometri, dan 6.000 paket PMT dengan jumlah anak stunting yang terbantu sebanyak 3.661 anak dan presentase penurunan prevalensi stunting sebanyak 10%. (*)



KR - Istimewa

BRI Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia



KR - Istimewa

BRI Peduli Salurkan Bantuan 'Cegah Stunting Itu Penting', Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia.



KR - Istimewa

Program bantuan "Cegah Stunting itu Penting" ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam tumbuh kembangnya khususnya Balita.